

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gaya kepemimpinan Kepala Desa saat ini menjadi topik penting yang perlu mendapat perhatian lebih serius dan pembahasan lebih mendalam. Hal itu dikarenakan posisi desa yang sangat strategis dari sudut pandang pembangunan negara. Hal ini karena desa memimpin identifikasi kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput, sedangkan perencanaan dan pelaksanaan tujuan pemerintahan berada di tingkat desa. (Sidik, 2019).

Masalahnya, 60 persen penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan fakta menunjukkan bahwa mereka menghadapi banyak masalah yang kompleks di antaranya; konflik, kerusakan lingkungan, pendidikan, perawatan kesehatan dan memperburuk situasi ekonomi desa yang terbelakang, yang meningkatkan kemiskinan negara. (Sandjojo, 2021).

Gaya kepemimpinan seorang Kepala Desa yang berhasil adalah gaya kepemimpinan yang dilakukan bersumber pada hati nurani, nilai-nilai norma, etika, kebebasan, pemberian kepercayaan, pengawasan, siap menerima kritik, saran yang bersifat membangun, tegas dan menghormati kreativitas, inovasi dan motivasi. Gaya kepemimpinan tersebut merupakan rangkaian sistem yang memiliki unsur penting yaitu mempengaruhi yang berdampak pada peningkatan kinerja yang meliputi peningkatan kompetensi profesional, peningkatan kompetensi kepribadian dan peningkatan kompetensi sosial (Suwarno, 2019). Sehingga dengan kemampuan pimpinan yang kuat dapat

mewujudkan kerjasama yang dapat memudahkan mencapai visi dan misi dalam organisasi.

Berdasarkan konsep kepemimpinan tersebut di atas, *stressing* kepemimpinan terletak pada proses, bukan pada hasil. Oleh karena itu setiap aktivitas organisasi hendaknya diperlukan azas transparansi, akuntabilitas, tahapan atau sistem operasional prosedurnya harus jelas, motivasi kerja, dan interaksi yang berlangsung harus penuh tanggung jawab. Agar sistem kerja dapat berjalan sesuai dengan sistem operasional prosedur yang ada, maka setiap komponen organisasi harus berjalan dengan baik.

Penyelenggara Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat yang sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, Kepala Desa juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, Kepala Desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakkan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kentrantaman masyarakat.

Desa Pakandangan Sangra seperti halnya desa-desa yang ada di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep untuk mengetahui maju dan perkembangannya desa tersebut dapat dilihat dari posisinya. Status desa dapat

diketahui dari kemajuan, kemandirian dan perkembangan desa yang ditentukan berdasarkan indeks pembangunan desa. Desa Pakandangan Sangra dengan status tersebut dapat dinilai dari segi perkembangan desanya sehingga dapat diketahui berdasarkan indikator mana yang dinilai apakah belum tercapai atau tercapai (Setyobakti, 2017).

Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintahan Desa, yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam setiap ide atau gagasan Pemerintah Desa dan masyarakat, sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Selain itu, Kepala desa harus memiliki pengetahuan manajemen yang baik dan pengalaman yang sesuai dengan pekerjaannya, seperti sistem manajemen keuangan, manajemen organisasi, perilaku organisasi dan manajemen hasil yang baik. (Agustini, 2017).

Selain memiliki kualifikasi yang sesuai, Kepala Desa juga harus kreatif dan inovatif dalam mengelola desa yang menjadi tanggungjawabnya. Diantara salah satu kualifikasi Kepala Desa adalah pendidikan terakhir bagi seorang Kepala Desa. Namun sayangnya, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada Desember 2019, diketahui bahwa secara umum latar belakang pendidikan terakhir Kepala Desa masih didominasi pada tingkat Sekolah Menengah Atas yaitu sebanyak 21.921 orang (Agustini, 2019). Selain pendidikan, ada beberapa alasan Kepala Desa tidak mengelola Dana Desa (DD) secara maksimal, yaitu:

1. Pemilihan calon Kepala Desa yang tidak mengutamakan kompetensi.

2. Belum adanya pelatihan atau sosialisasi yang seragam tentang aturan dan sanksi penggunaan Dana Desa (DD).
3. Sebagian Dana Desa (DD) tidak dibayarkan sesuai jadwal karena masalah administrasi. Akibatnya, menghambat program pemerintah untuk percepatan pembangunan (Laloma, 2019).

Banyak kajian yang menyebutkan bahwa kepemimpinan kepala desa sangat berpengaruh terhadap kemajuan desa, jika kepemimpinan kepala desa berjalan dengan baik maka kinerja organisasi meningkat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kemajuan desa (Eka, 2018). Terbagi 3 (tiga) tipe dalam kepemimpinan Kepala Desa yaitu :1). Kepemimpinan regresif, 2). Kepemimpinan konservatif-involutif, dan 3). Kepemimpinan inovatif-progresif (Mustakim, 2018).

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, kepemimpinan kepala desa yang inovatif dan progresif harus mampu mengarahkan desa menuju pembangunan yang mandiri. Banyak studi kuantitatif telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, mencari gaya kepemimpinan kepala desa atau menggabungkannya dengan variabel lain. Namun sangat jarang ditemukan kajian fundamental (kualitatif) yang secara subjektif menemukan kepala desa yang mampu mengelola desanya secara mandiri sehingga dapat memberikan inspirasi kepada kepala desa lainnya.

Namun demikian, mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah membawa dampak positif terhadap tata kelola pemerintah desa. Dalam hal ini, desa mempunyai hak kekuasaan penuh untuk

mengatur dan mengelola pemerintahan desanya untuk lebih baik menuju desa mandiri. Pola tata kelola merupakan peraturan internal yang dilakukan sebagai upaya untuk menjadikan suatu lembaga pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Dimana dalam hal tata kelola ini menyangkut pengaturan mengenai organisasi, tata laksana, akuntabilitas serta transparansi dari organisasi (UU RI, 2014).

Desa Pakandangan Sangra merupakan salah satu desa dari 20 desa yang ada di Kecamatan Bluto. Desa Pakandangan Sangra berjarak \pm 5 km ke Kantor Kecamatan Bluto dan \pm 18 km ke Kabupaten/Kota Sumenep. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Desa Pakandangan Sangra dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya, yaitu 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kasi, 3 (tiga) orang Kaur dan 3 (orang) Kepala Dusun atau Kadus. Desa Pakandangan Sangra memiliki Kantor Desa sebagai tempat pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan yang dilakukan di Kantor Desa tersebut hanya dilakukan pelayanan terhadap barang dan jasa sedangkan pelayanan administrasinya dilakukan di rumah Kepala Desa. (Sumber: Perangkat Desa, Bukhari Muslim)

Selama ini, administrasi pemerintahan desa Pakandangan Sangra Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep belum mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat, sehingga optimalisasi tata kelola administrasi Desa Pakandangan Sangra Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep menjadi faktor pendorong dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa Pakandangan Sangra. Namun, seperti apa yang telah peneliti ketahui saat

ini dari hasil observasi bahwa permasalahan terkait tata kelola administrasi desa Pakandangan Sangra Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep masih dijumpai berbagai permasalahan, seperti informasi persyaratan pelayanan administrasi yang belum diketahui/dijangkau oleh masyarakat, prosedur dan mekanisme yang belum optimal, serta sebagian besar penyelenggaraan pelayanan di desa Pakandangan Sangra Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep masih dilakukan secara konvensional, dimana hal ini menyebabkan proses administrasi berjalan lama. Oleh karena itu, tata kelola pelayanan administrasi desa Pakandangan Sangra perlu dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar desa bukan hanya bisa mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan, akan tetapi dapat meningkatkan daya saing desa.

Tata kelola pemerintah desa Pakandangan Sangra dalam organisasi tidaklah efektif, hal ini dibuktikan dengan beberapa hal, yaitu: tidak disiplinnya perangkat desa dalam jam masuk kantor, tidak efektifnya pengaturan arsip surat masuk dan surat keluar, tidak dilakukannya pencatatan atau pengisian terhadap macam-macam kegiatan buku desa, tidak tersedianya fasilitas kantor seperti komputer di kantor desa, rendahnya kemampuan Aparatur Desa dalam mengoperasikan komputer dan adanya Aparatur Desa Pakandangan Sangra yang tidak memahami akan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai perangkat desa sehingga tupoksi sebagai perangkat desa terabaikan mengakibatkan timbulnya masalah di eksternal organisasi, yaitu pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat tidak konsisten yaitu pelayanan administrasi yang berbelit-belit sehingga terkesan lamban dan lama

dan pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat yang tidak sama atau tidak adil dalam mengambil suatu tindakan dalam keputusan. (Sumber: Perangkat Desa, Ansori dan Masyarakat Desa, Matraji).

Tata kelola desa Pakandangan Sangra Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dilakukan belum terstruktur dan sistematis. Desa bukan hanya bisa mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan tetapi juga bisa meningkatkan daya saing desa. Artinya, Pemerintah desa Pakandangan Sangra dalam hal ini Kepala Desa, harus dapat menilai terhadap kinerja bawahannya dalam mengelola pemerintahannya sehingga arah tujuan desa dapat diketahui dan pengelolaan pemerintahan desa yang baik tercapai sehingga dapat meningkatkan daya saing desa.

Selain itu pula, fungsi-fungsi dalam pemerintahan desa Pakandangan Sangra Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep perlu untuk dimaksimalkan agar bisa sejalan dengan tujuan tata kelola desa. Tata kelola desa dapat diwujudkan dengan adanya peran baik atau keterlibatan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sehingga proses tata kelola desa Pakandangan Sangra yang baik diharapkan memiliki dampak positif terhadap penataan desa. Sebagaimana dapat diketahui bahwa tujuan tata kelola desa adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Tata kelola desa Pakandangan Sangra Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep belum menjadikan pemerintahan desa yang dapat menggunakan dana desa secara efektif. Apabila desa Pakandangan Sangra dapat menggunakan dana desa secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal maka akan mendorong investasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Minimnya pelayanan yang diberikan oleh staf desa mengakibatkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat menjadi rendah karena pelayanan administrasi yang seharusnya terpusat di kantor desa melainkan terpusat di rumah Kepala Desa sehingga mengakibatkan pelayanan administrasi yang efektif dan efisien berjalan lamban dan lama. (Sumber: masyarakat, Suwarno).

Ketidaknyamanan dalam pemberian pelayanan administrasi yang bertumpu di rumah Kepala Desa juga dirasakan oleh masyarakat terutama terhadap masyarakat yang tidak memberikan hak pilihnya atau hak suaranya kepada Kepala Desa terpilih saat ini. Rasa sungkan atau rasa enggan masyarakat untuk berhadapan langsung dengan seorang Kepala Desa dalam mendapatkan pelayanan masih terasa sampai saat ini. Hal ini mengakibatkan tingkat keharmonisan atau terjalinnya komunikasi yang baik antara masyarakat dengan Kepala Desa sangatlah rendah sehingga berdampak terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal kemasyarakatan maupun dalam hal pembangunan desa, seperti tidak diundangnya Kepala

Desa dalam acara-acara tertentu yaitu acara selamatan, tidak tampaknya partisipasi masyarakat ketika ada kegiatan desa, seperti kegiatan perbaikan jalan yang rusak, kegiatan gotong royong antar Rt maupun antar Rw dan lain sebagainya. (Sumber: masyarakat Pakandangan Sangra, Syamsul).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk menyusun suatu penelitian ini dengan judul “Gaya *Servant Leadership* dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Pakandangan Sangra”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Gaya *Servant Leadership* dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Pakandangan Sangra”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui “Gaya *servant leadership* dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Pakandangan Sangra”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan penelitian administrasi publik pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk dapat mengembangkan cakrawala berpikir penulis dan menerapkan hasil pendidikan yang diperoleh di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Sumenep (FISIP), khususnya dalam penerapan gaya kepemimpinan pelayan dalam pemerintahan desa.

b. Bagi Universitas

Sebagai dokumentasi dan bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan penelitian sebagai salah satu syarat kelulusan, dan juga sebagai referensi dan sumber bagi peneliti selanjutnya dengan topik penelitian yang sama.

c. Bagi Pemerintahan Desa

Dapat memberikan bahan masukan kepada Aparatur Pemerintah Desa sebagai penyelenggara tata kelola pemerintahan desa yang baik.

d. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi bahwa topik yang diangkat dalam karya ini telah diteliti secara menyeluruh sesuai dengan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dan sebagai informasi bahwa penerapan gaya kepemimpinan yang benar adalah pengabdian yang tulus dan sepenuh hati.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka dari itu peneliti menyusun sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman sehingga dapat dijelaskan dengan baik dengan menunjukkan susunan bab pada penelitian untuk memudahkan para pembaca memahami isi penelitian ini.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab I ini berisi tentang latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab II ini berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul peneliti sehingga dapat dijadikan referensi dalam penyusunan penelitian ini. Pada bagian ini juga membahas tentang grand teori dan teori pendukung.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab III ini berisi tentang metodologi yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian kualitatif. Pada bagian ini juga memaparkan fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrument penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab IV ini menjelaskan gambaran umum dari objek penelitian, baik berupa legalitas gambaran umum Desa Pakandangan Sangra, kondisi geografi dan topografi Desa Pakandangan Sangra, visi dan misi Desa Pakandangan Sangra, sejarah pembangunan Desa Pakandangan Sangra.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab V ini memaparkan dan menguraikan tentang deskripsi data hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci,

informan utama, informan pendukung serta dilakukan observasi secara langsung dan dokumentasi.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab VI ini disampaikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.

